

LOMPATAN BESAR UBAH STIGMA KOTA SEJUTA ANGKOT

Kota Bogor akan Operasikan Transportasi Umum BTS

BOGOR (IM)- Kota Bogor akan mengoperasikan transportasi umum buy the service (BTS). Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna menilai, program ini merupakan satu lompatan besar untuk merubah stigma Kota Bogor sebagai kota sejuta angkot.

Transportasi BTS ke depan menjadi role model di mana angkot atau kendaraan pengumpan (feeder) mendapat subsidi dari pemerintah. "Diharapkan Pak Presiden Jokowi bisa launching karena Bogor menjadi percontohan ke depan persis mirip Jak Linko dengan TransJakarta," kata Yayat di Balai Kota Bogor, Senin (26/7).

Yayat melihat, ada banyak keuntungan bagi masyarakat dan pengusaha angkutan di Kota Bogor lantaran program BTS dibiayai pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Dari sisi masyarakat, tarif BTS mendapatkan subsidi artinya akan ada pemotongan tarif yang dibayarkan penumpang. Selain itu, terpenting BTS tidak ngetem lantaran operasional bus berdasarkan jarak tempuh/kilometer, dan ke depan

kendaraan yang dipakai ramah lingkungan serta berbasis IT. "Tarifnya lebih murah dan tidak ngetem karena sopir taat aturan dan profesional. Berbasis IT, sehingga dapat dimonitor," kata Yayat.

Keberadaan transportasi umum BTS akan mengurangi jumlah angkot di Kota Bogor dengan konversi tiga angkot ditukar dengan satu bus. Operasionalnya menggunakan sopir dan kendaraan yang sudah berbadan hukum.

Plt Direktur Angkutan BPTJ, Saptandri Widiyanto menambahkan, secara pembiayaan sepenuhnya akan ditanggung pemerintah pusat selama satu tahun dan tahun berikutnya. Saat ini, tengah melakukan lelang untuk memilih perusahaan yang nantinya akan menjadi operator BTS.

"Kewenangan pemerintah daerah (pemkot), dia yang keluaran perizinan, dia yang kontrol untuk SPM (standar pelayanan minimum). Artinya yang menerbitkan perizinan adalah Kota Bogor, kewangannya bus melanggar izinnya bisa dicabut," tambah Sapta. ● **gio**

INI HASIL EVALUASI PEMBERLAKUAN SELAMA PPKM

Ganjil Genap di Kota Bogor Diterapkan di Hari Kerja

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor melanjutkan kebijakan ganjil genap setelah masa PPKM Darurat berakhir, hari ini, 26 Juli 2021. Evaluasi setelah kebijakan itu diberlakukan menunjukkan hasil yang sangat efektif menekan mobilitas masyarakat dengan harapan bisa mengurangi angka kasus Covid-19.

Apalagi ditambah dengan bantuan tunai yang mulai didistribusikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, "Pasti (efektifitasnya) akan meningkat di kawasan kota," kata Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condoro, Minggu (25/7) malam.

Target dari pemberlakuan kebijakan ini adalah menekan mobilitas warga hingga 50 persen. Kebijakan ganjil genap untuk plat nomor kendaraan tidak hanya diberlakukan pada akhir pekan, tapi juga pada hari kerja sepekan

ini. "Kami berlakukan hingga satu minggu mendatang dan sistem ganjil genap Bogor ini berlaku selama 24 jam," kata dia.

"Ada 16 titik sekat dan beberapa titik-titik checkpoint," ujar Susatyo. Penyekatan dilakukan di tiga lokasi, di antaranya di perbatasan kota dan di dalam kota secara situasional berdasarkan evaluasi.

Lokasi pengecekan selama PPKM Level 4 itu ada di Jembatan Merah, Empang (satu arah dari BTM), Baranangsiang, McD Lodaya, Simpang Dempom, Warung Jambu, SPBU Vivo Air Mancur, ex Bale Binarum, Underpass Solis, Tol BORR, SPBU Veteran, Salabenda, Ciawi, Darmaga, Yasmin dan Brimob Kedung Halang.

Kebijakan ganjil genap ini dikecualikan untuk jenis kendaraan tertentu. Pengecualian diberikan kepada angkutan online, angkutan kota hingga pengantar logistik. ● **gio**



IDN/ANTARA

BANTUAN PETI MATI PEMKAB BANYUMAS

Pekerja mengangkut peti mati yang akan digunakan bagi jenazah pasien COVID-19, di GOR Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (26/7). Pemkab Banyumas menerima bantuan peti mati dari sejumlah organisasi masyarakat dan pengusaha, terkait jumlah kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Banyumas yang mencapai 602 kasus dari tanggal 1-25 Juli 2021

Kasus Covid-19 di Bandung Masih Tinggi, Ini Kata Dinkes

BANDUNG (IM)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung memberikan penjelasan terkait kondisi jumlah kasus Covid-19 yang masih tinggi di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Salah satu faktor yang menyebabkan kasus masih tinggi terjadi karena tes dan pelacakan yang masih dilakukan sehingga terdeteksi kasus Covid-19.

Berdasarkan pusat data dan informasi Covid-19 Kota Bandung melansir hingga Minggu (25/7), total konfirmasi Covid-19 di Kota Bandung mencapai 34.865 kasus dengan kasus konfirmasi aktif harian mencapai 448 kasus. Total konfirmasi aktif telah mencapai 8.203 kasus, sembuh mencapai 25.491 kasus dan meninggal dunia 1.171 kasus.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Yoris Satria mengatakan, kasus Covid-19 yang masih tinggi disebabkan karena tes, pelacakan dan treatment yang dilakukan secara masif. Kondisi tersebut akan lebih tinggi jika PPKM tidak diberlakukan di Bandung. "(Kasus tinggi) bisa karena upaya 3T Kota Bandung masif, jadi banyak yang terdiagnosa hasil tracing, testing dan treatment-nya," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (26/7).

Dia menuturkan, jika PPKM tidak diberlakukan maka kasus Covid-19 akan semakin tinggi. Sebab mobilitas masih akan terus terjadi, protokol kesehatan mulai kendur, terjadi kumpulan keluarga besar.

"Bila dibandingkan dengan tidak ada kebijakan PPKM akan

lebih besar lagi angkanya, prediksi secara epidemiologi. Mobilitas mungkin masih terjadi, proses mulai kendur, kumpulan keluarga besar di luar keluarga inti," katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinkes Kota Bandung, Ahyani Raksanagara yang mengatakan saat PPKM berlangsung pelacakan, tes dan isolasi dilakukan secara masif sehingga berpengaruh terhadap kasus yang tinggi. Keberadaan rapid tes antigen yang diakui sebagai salah satu alat mendiagnosa turut berpengaruh terhadap jumlah kasus.

"Di masa PPKM justru strategi nasional lacak, testing, isolasi juga rapid diakui sebagai diagnosa," katanya. Dia melanjutkan, pihaknya juga menyisir laporan terkait kematian akibat Covid-19 sehingga angkanya tinggi.

Pada data dan pusat informasi Covid-19 menunjukkan juga 10 kecamatan penyumbang konfirmasi aktif Covid-19 tertinggi yaitu Kiaracandong 612 kasus, Bojongloa Kaler 543 kasus, Rancasari 475 kasus, Sukasari 461 kasus, Antapani 456 kasus. Coblong 417 kasus, Batununggal 402 kasus, Lengkong 322 kasus, Regol 294 kasus dan Bandung Kulon 288 kasus. 10 kelurahan penyumbang konfirmasi Covid-19 tertinggi yaitu Antapani Kidul 256 kasus, Cipamokolan 245 kasus, Babakan Sari 189 kasus. Kecamatan Sarijadi 189 kasus, Gegerkalong 179 kasus, Manjahlega 174 kasus, Dago 163 kasus. Antapani Tengah 158 kasus, Jamika 154 kasus dan Kopo 150 kasus. ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

JUMLAH PENUMPANG KRL COMMUTERLINE MENINGKAT DI STASIUN BOGOR

Sejumlah calon penumpang KRL Commuterline antre saat pemeriksaan dokumen di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (26/7). Hari pertama perpanjangan PPKM, jumlah penumpang KRL Commuterline di Stasiun Bogor mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 40 ribu menjadi 60 ribu penumpang atau sebesar 20-25 persen dan hanya melayani penumpang untuk esensial, kritikal serta masyarakat dengan kebutuhan mendesak.

10 Kecamatan Tertinggi Penularannya di Kab. Bogor Dapat Bantuan Vaksin

Pemkab Bogor terus berakselerasi demi percepatan target masyarakat yang divaksin Covid-19 saat ini dari target 1,2 juta jiwa, kami sudah memvaksinasi Covid-19, 664 ribu jiwa di antaranya. Insya Allah target akan tercapai asalkan vaksin Covid-19 nya tersedia, kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Hadijana, Senin (26/7).

Mantan Camat Cijeruk ini menambahkan bantuan Vaksin Covid-19 ini sangat membantu Pemkab Bogor dalam pencapaian target 1,2 juta masyarakat Bumi Tegar Beriman yang telah divaksinasi Covid-19.

"Pemkab Bogor terus berakselerasi demi percepatan target masyarakat yang divaksin Covid-19, saat ini dari target 1,2 juta jiwa, kami sudah

Cibinong, Parung, Tajur Halang, Bojonggedde, Citeureup, Gunung Putri, Cileungsi, Babakan Madang, Giomas dan Dramaga masing-masing mendapatkan bantuan 5.600 Vaksin Sinovac Covid-19 secara bertahap dari BPPBD Jawa Barat," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Hadijana kepada wartawan, Senin (26/7).

Mantan Camat Cijeruk ini menambahkan bantuan Vaksin Covid-19 ini sangat membantu Pemkab Bogor dalam pencapaian target 1,2 juta masyarakat Bumi Tegar Beriman yang telah divaksinasi Covid-19.

"Pemkab Bogor terus berakselerasi demi percepatan target masyarakat yang divaksin Covid-19, saat ini dari target 1,2 juta jiwa, kami sudah

memvaksinasi Covid-19 664 ribu jiwa di antaranya. Insya Allah target kita tercapai asalkan vaksin Covid-19nya tersedia," tambahnya.

Camat Cibinong, Rusly Andi menjelaskan saat ini, Pemerintah Kecamatan Cibinong sejak awal Bulan Juli ini sudah memvaksinasi Covid-19 40 ribu jiwa masyarakatnya.

"Dari jumlah masyarakat Kecamatan Cibinong sebanyak 420 ribu jiwa, kami sudah memvaksinasi Covid-19, 40 ribu jiwa di antaranya. Jumlah masyarakat kami yang tervaksinasi kami anggap lebih dari 10 persen karena ada program vaksinasi dari Dinas Kesehatan, Polres Bogor, Kodim 0621, Kejaksaan Negeri dan Kadin Kabupaten Bogor, percepatan vaksinasi ini kami lakukan

baik itu di Puskesmas, Kantor Kecamatan, Mall atau tempat lainnya yang bisa memenuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dan pelaksanaannya pun tiga kali dalam seminggu," jelas Rusly.

Selain masyarakat, mantan Camat Rumpin ini melanjutkan bahwa sasaran vaksinasi Covid-19 hari ini juga menasar kelompok pedagang baik Pasar Ciri Mekar, Pasar Cibinong maupun Cibinong Kesohor Market (Cikema).

"Karena bantuan vaksin Sinovac Covid-19 ini bertahap turunnya, kami pun menjadwalkan pelaksanaannya berkelurahan atau perkelompok. Hari ini selain masyarakat umum, kelompok pedagang juga banyak yang divaksinasi Covid-19 pada hari ini," lanjutnya. ● **gio**

KASUS POSITIF BARU TEMBUS 598 PER HARI

Kabupaten Bogor Kini Masuk Zona Merah Covid-19

CIBINONG (IM)- Wilayah Kabupaten Bogor kini masuk zona merah (berisiko tinggi) terkait penyebaran virus korona atau Covid-19. Ditetapkannya Kabupaten Bogor sebagai zona merah sudah terlihat di laman resmi pemerintah <https://covid19.go.id/peta-risiko> per Senin (26/7).

Setelah sebelumnya masuk zona oranye (berisiko sedang), Kabupaten Bogor menyusul daerah tetangganya yakni Kota Bogor yang sudah lebih dulu masuk zona merah. Berdasarkan laporan harian Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, selama Juli 2021 dari tanggal 1 - 25, kasus positif baru bertambah sebanyak 14.974 orang. Atau rata-rata mengalami penambahan sebanyak 598 positif baru per hari.

Kemudian untuk kasus pasien Covid-19 meninggal dunia selama periode yang sama mengalami penambahan sebanyak 307 orang atau rata-rata sekitar 12 orang meninggal dunia setiap hari. Sedangkan untuk kasus sembuh di periode yang sama bertambah sebanyak 7.810 atau rata-rata sekitar 312 orang sembuh per hari.

Berdasarkan data Covid-19 Kabupaten Bogor terbaru per 25 Juli 2021, kasus positif baru bertambah sebanyak 352 orang.

Jumlah ini didapat dari laporan tes PCR sejumlah rumah sakit dan fasyankes di sekitar Jabodetabek berdasarkan input KTP dengan alamat Kabupaten Bogor. "Tambahan 352 konfirmasi positif. Jumlah konfirmasi aktif (masih dirawat/sakit) 8.143 orang," kata Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, Ade Yasin dalam keterangan tertulis, Senin (26/7).

Lalu untuk kasus pasien Covid-19 meninggal dunia di tanggal yang sama mengalami penambahan sebanyak 18 orang. Meski begitu, kasus sembuh di hari yang sama juga mengalami penambahan tidak sedikit. "Tambahan 608 kasus sembuh," kata Ade Yasin yang juga Bupati Bogor ini.

Berikut data kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor sampai 25 Juli 2021.

- Suspek = 453 Orang
- Probable = 11 Orang
- Total Kasus Positif Covid-19 = 35.949 Kasus.
- Sembuh = 27.381 Orang
- Meninggal = 419 Orang
- Konfirmasi Aktif = 8.143 Orang
- Probable Meninggal = 311 Orang
- Pindah Alamat ke Luar Bogor = 6 Orang. ● **gio**

Ini Syarat Terbaru Perjalanan KA Jarak Jauh dan KA Lokal

BANDUNG (IM)- Mulai 26 Juli 2021, ini ada perubahan syarat perjalanan menggunakan kereta api (KA). Menurut Manager Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, pada masa 26 Juli - 2 Agustus perjalanan KA jarak jauh sudah tidak disyaratkan menggunakan surat keterangan atau surat izin dari instansi tempat bekerja.

Namun, menurut Kuswardoyo, pelanggan Kereta Api Jarak Jauh di Pulau Jawa dan Sumatera wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. "Khusus perjalanan KA Jarak Jauh di Pulau Jawa, pelanggan juga diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama," ujar Kuswardoyo, kepada wartawan, Senin (26/7).

Kuswardoyo mengatakan, bagi pelanggan KA Jarak Jauh di wilayah Daop 2 Bandung yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis tetap dapat menggunakan Kereta Api Jarak Jauh dengan

menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis dan disertai surat negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku.

Sedangkan untuk pelanggan usia di bawah 18 tahun, kata dia, tidak diharuskan menunjukkan kartu vaksin. Kemudian untuk pelanggan usia di bawah 5 tahun tidak diharuskan menunjukkan hasil RT-PCR atau Rapid Test Antigen.

Sedangkan bagi pelanggan yang menggunakan KA Lokal Bandung Raya, kata dia, hanya berlaku untuk perkantoran Sektor Esensial dan Sektor Kritis yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Pekerja atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Surat Tugas dari pimpinan perusahaan.

"Pelanggan KA lokal tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen. Namun akan dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen secara acak kepada para pelanggan di stasiun," paparnya. ● **pur**

Bima Arya Klaim Ganjil Genap Lebih Efektif ketimbang Penyekatan

BOGOR (IM)- Wali Kota Bogor, Bima Arya mengklaim sistem Ganjil Genap lebih efektif dan efisien ketimbang penyekatan untuk menekan mobilitas warga.

Bahkan, kata Bima Arya, sistem ganjil genap ini diapresiasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi saat berkunjung ke Balai Kota Bogor, Minggu petang (25/7).

"Karena penyekatan kemarin membutuhkan energi yang besar juga tingkat keterpaparan yang tinggi di antara para petugas. Tapi bukan berarti penyekatan ditinggalkan. Ditambah dengan sistem Ganjil Genap yang diapresiasi Pak Menhub dan Pak Menko, mungkin akan juga dijalankan di kota - kota lain," urai Bima Arya.

Meski begitu, kebijakan Ganjil Genap ini bukan berarti akan diterapkan di hari - hari biasa setelah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berakhir. Kebijakan ini akan kembali dievaluasi Forkopimda.

"Nanti akan kita putuskan apakah hari biasa berlanjut atau

tidak. Sepertinya PPKM seperti yang disampaikan bapak Presiden, ke depan akan menyesuaikan dengan levelnya," sahut Bima Arya.

Dengan maksud, bagi yang indikator penularan Covid-19 di daerah membaik, maka bisa turun ke level 3 atau 2. Jika tidak, maka statusnya masih berada di level 4.

Diputar Balik

Hari pertama perpanjangan aturan ganjil genap pada hari kerja di wilayah Kota Bogor terpantau ramai. Banyak kendaraan yang diputar balik oleh petugas karena plat nomor tidak sesuai ketentuan.

Dari pantauan di lapangan di check point Simpang Air Mancur hingga pukul 10.23 WIB, satu per satu kendaraan dari arah Warung Jambu menuju Jalan Jenderal Sudirman diperiksa petugas.

Masih banyak kendaraan roda dua maupun roda empat yang diputar balik oleh petugas karena plat nomor tidak sesuai dengan harinya. Alhasil, terjadi kemacetan yang cukup panjang karena pemeriksaan.

"Seperti yang kita lihat, memang masyarakat masih



IDN/ANTARA

VAKSINASI MASSAL DI LANUD HUSEIN SASTRANEGARA

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga di Hanggar Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Senin (26/7). Menjelang peringatan Hari Bakti TNI AU ke-74, TNI AU Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Bandung memberikan 4.000 dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat dan 4.000 paket sembako.